

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

SATKER BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
			4	5		
1	2	3	Satuan		6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC					Provinsi & Kabupaten/ Kota
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan	641.980.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP		100	%		
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan	144.600.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	3	Laporan	108.050.000	Provinsi
	052 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan	36.550.000	Provinsi
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan	497.380.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	26	Laporan	402.025.000	Kab/Kota
	052 Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	26	Laporan	95.355.000	Kab/Kota
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga	236.411.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		34	Daerah		
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga	236.411.000	RPJMN
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	236.411.000	Provinsi
BKC	Pemantauan Lembaga		112	Laporan	1.021.051.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%		
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		8	Laporan	546.265.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	222.157.000	Provinsi
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	2	Laporan	257.118.000	Provinsi
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan	61.640.000	Provinsi
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan	5.350.000	Provinsi
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		104	Laporan	474.786.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	13	Laporan	263.354.000	Kab/Kota
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	26	Laporan	138.762.000	Kab/Kota
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	52	Laporan	35.750.000	Kab/Kota
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	13	Laporan	36.920.000	Kab/Kota

## SATKER BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
			4	5		
1	2	3	4	Satuan	6	7
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU					Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
<b>QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>		<b>14</b>	<b>Lembaga</b>	<b>5.633.685.000</b>	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01 Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu		549	Daerah		
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga	2.147.241.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	73.460.000	Provinsi
	052 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	37.680.000	Provinsi
	053 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	4	Laporan	842.280.000	Provinsi
	054 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	289.407.000	Provinsi
	055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	245.140.000	Provinsi
	056 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	245.140.000	Provinsi
	057 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	414.134.000	Provinsi
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		13	Lembaga	3.486.444.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	13	Laporan	319.995.000	Kab/Kota
	052 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	26	Laporan	319.995.000	Kab/Kota
	053 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	52	Laporan	608.790.000	Kab/Kota
	054 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	26	Laporan	831.090.000	Kab/Kota
	055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	52	Laporan	245.115.000	Kab/Kota
	056 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	52	Laporan	245.115.000	Kab/Kota
	057 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	52	Laporan	916.344.000	Kab/Kota
6.662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU					Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
<b>QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>		<b>14</b>	<b>Lembaga</b>	<b>796.380.000</b>	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01 Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu		549	Daerah		
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga	375.180.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	62.310.000	Provinsi
	052 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	104.290.000	Provinsi
	053 Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	104.290.000	Provinsi
	055 Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	104.290.000	Provinsi
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		13	Lembaga	421.200.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051 Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	13	Laporan	50.700.000	Kab/Kota
	052 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	13	Laporan	123.500.000	Kab/Kota
	053 Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	13	Laporan	123.500.000	Kab/Kota
	055 Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	13	Laporan	123.500.000	Kab/Kota
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM					Provinsi & Kabupaten/ Kota
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		<b>6</b>	<b>Layanan</b>	<b>24.935.406.000</b>	
	<i>Indikator KRO :</i>					

## SATKER BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
	01 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
<b>956</b>	<b>Layanan BMN</b>		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>357.595.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan: 1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota	6	Laporan	251.515.000	Provinsi
	052 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset persemester	13	Laporan	106.080.000	Kab/Kota
<b>957</b>	<b>Layanan Hukum</b>		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>301.400.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan: 1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota	2	Laporan	178.170.000	Provinsi
	052 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan (pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses)	1	Laporan	27.875.000	Provinsi
	053 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	13	Laporan	95.355.000	Kab/Kota
<b>958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</b>		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>329.810.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: <b>keterbukaan informasi publik (Indikator IKU)</b> 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	5	Laporan	168.480.000	Provinsi
	052 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	52	Laporan	161.330.000	Kab/Kota
<b>963</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>218.550.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia: 1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota	3	Laporan	180.200.000	Provinsi
	052 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester	26	Laporan	38.350.000	Kab/Kota
<b>969</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>12.790.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	12.790.000	Provinsi
<b>994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>23.715.261.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	001 Gaji dan tunjangan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	1	Layanan	9.002.867.000	Prov & Kab/Kota
	002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan	14.712.394.000	Prov & Kab/Kota
<b>EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>124.168.000</b>	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80	%		
<b>951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>			<b>Unit</b>	<b>124.168.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	9	Unit	109.570.000	Provinsi
	056 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2	Unit	14.598.000	Kab/Kota
<b>EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>		<b>327</b>	<b>Orang</b>	<b>462.375.000</b>	
	<b>Indikator KRO :</b>					

## SATKER BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab	
			4	5			
1	2	3	4	Satuan	6	7	
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%			
954	<b>Layanan Manajemen SDM</b>		327	Orang	462.375.000		
	<b>Komponen Input :</b>						
	051	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai provinsi)	62	Orang	130.875.000	Provinsi
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai kabupaten/kota)	265	Orang	331.500.000	Kab/Kota
EBD	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>		275	Dokumen	1.503.915.000		
	<b>Indikator KRO :</b>						
	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%			
952	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>		15	Dokumen	252.150.000		
	<b>Komponen Input :</b>						
	051	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran: 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	2	Dokumen	146.070.000	Provinsi
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	13	Dokumen	106.080.000	Kab/Kota
953	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>		20	Dokumen	322.015.000		
	<b>Komponen Input :</b>						
	051	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program: 1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	7	Dokumen	213.140.000	Provinsi
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	13	Dokumen	108.875.000	Kab/Kota
955	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>		170	Dokumen	488.900.000		
	<b>Komponen Input :</b>						
	051	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	14	Dokumen	235.790.000	Provinsi
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	156	Dokumen	253.110.000	Kab/Kota
961	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>		56	Dokumen	193.790.000		
	<b>Komponen Input :</b>						
	051	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	4	Dokumen	78.610.000	Provinsi
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	52	Dokumen	115.180.000	Kab/Kota
974	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</b>		14	Dokumen	247.060.000		
	<b>Komponen Input :</b>						
	051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	143.580.000	Provinsi
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	13	Dokumen	103.480.000	Kab/Kota
<b>TOTAL</b>					<b>35.355.371.000</b>		